Pangdam Jaya Mayjen Dudung Diangkat Menjadi Pangkostrad

JAKARTA (IM) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali melakukan mutasi i dan rotasi jabatan Perwira Tinggi (Pati). Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, pembinaan karier dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas TNI.

Salah satu perwira tinggi yang dimutasi adalah Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman. Jenderal bintang dua dipercaya untuk menempati posisi barunya sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pankostrad) menggantikan Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono yang diangkat menjadi Kepala Staf Umum (Kasum) TNI.

Dengan demikian, kini Dudung resmi menyandang bintang tiga alias letnan jenderal.

Berantas *Debt Collector*

Sebelumnya Kasum TNI Letjen TNI Ganip Warsito diangkat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantian Doni Monardo yang telan memasuki masa purna tugas. Sebelum menjadi Pangkostrad, nama Mayjen Dudung memang sudah dikenal banyak kalangan. Aksinya melawan FPI dan *debt collector* sempat jadi perbincangan banyak pihak.

Pada November 2020, Nama Mayjen Dudung sempat disorot karena aksinya mencopot baliho bergambar Rizieq Shihab, yang saat itu menjadi pemimpin Front Pembela Islam (FPI).Mayjen Dudung beralasan, aksinya tersebut sebagai tanda bahwa semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia, termasuk dalam urusan pemasangan baliho. Di saat yang sama, Dudung juga melontarkan wacana agar FPI dibubarkan.

Pada Mei 2021, Mayjen Dudung kembali menunjukkan ketegasannya dengan pernyataan komitmen untuk menumpas perilaku premanisme debt collector di wilayah Jabodetabek.

Hal itu disampaikan sebagai respons atas aksi para debt collector yang sudah meresahkan, diantaranya kasus perampasan mobil yang tengah dikendarai anggota TNI saat hendak mengantar orang sakit. ● **mei**

1.078 Narapidana Dapat Remisi Khusus Hari Raya Waisak 2021

JAKARTA (IM) - Sebanyak 1.078 narapidana mendapatkan remisi khusus Hari Raya Waisak Tahun 2021 dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Rabu (26/5).

Rinciannya, dari 1.078 penerima remisi khusus (RK) Waisak, sebanyak 1.066 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian. Di mana 145 orang menerima remisi 15 hari, 587 narapidana mendapat remisi 1 bulan, 206 narapidana mendapat remisi 1 bulan 15 hari, dan 2 bulan remisi untuk 128 narapidana.

Sementara itu, ada 12 orang menerima RK II atau bebas. Reynard mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, hak narapidana seperti remisi, asimilasi dan integrasi, layanan kunjungan online, serta layanan kesehatan tetap dilayani.

Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal 6 bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan.

Demikian diungkap Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Reynhard Silitonga, dikutip dari siaran pers, Rabu (26/5).

"Diharapkan pemberian remisi dapat memotivasi narapidana untuk mencapai penyadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku seharihari," kata Reynhard.

Reynhard mengatakan, pemberian RK juga berhasil menghemat anggaran makan narapidana sebanyak Rp 633 juta. Antara lain Rp 624 juta dari 1.066 narapidana penerima RK I dan Rp 8 juta dari 12 narapidana penerima RK II.

"Pemberian remisi bukan sekadar reward kepada narapidana yang berkelakuan baik serta memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Fakta yang tak kalah penting adalah anggaran negara yang dihemat dengan berkurangnya masa pidana narapidana," kata Reynhard.

Tahun ini, narapidana terbanyak yang mendapat RK Waisak berasal dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, yakni 221 orang, Kanwil Kemenkumham Banten 153 orang, dan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat 140 orang. Sedangkan berdasarkan data smslap.ditjenpas.go.id per 18 Mei 2021, jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 263.824 orang dengan rincian narapidana sebanyak 211.418 orang dan tahanan sebesar 52.406 orang. ● **han**

IDN/ANTARA

RDP TERKAIT KEBOCORAN DATA PASIEN BPJS KESEHATAN

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti (kiri) berbincang dengan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto (kanan) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX terkait dugaan kebocoran data peserta BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5). Dalam Rapat tersebut Ali Ghufron Mukti menyampaikan telah menyiapakan sejumlah langkah keamanan terkait kebocoran data peserta BPJS Kesehatan diantaranya melakukan penutupan sementara aplikasi yang berisiko dan menunda kerja sama yang terkait dengan pertukaran data untuk sementara waktu.

Presiden Jokowi Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Sebanyak 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK akhirnya dipecat. Sedangkan 24 lainnya akan mendapat pendidikan wawasan kebangsaan agar bisa menjadi ASN.

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya membatalkan keputusan pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaaan (TWK).

Seperti diketahui bahwa tes tersebut merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). ICW berharap Jokowi tetap melantik semua pegawai KPK menjadi ASN.

"Presiden Joko Widodo harus membatalkan keputusan Pimpinan KPK dan Kepala BKN dengan tetap melantik seluruh pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (26/5).

Ia menyoroti soal tidak adanya landasan atau dasar hukum pelaksanaan TWK. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tidak mengatur soal ketentuan seleksi dalam alih status kepegawaian KPK.

"Sebab TWK diselundupkan secara sistematis oleh Pimpinan KPK melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2001 (Perkom 1/2021)," kata Kurnia.

Keputusan pemberhentian pegawai KPK dianggap telah mengabaikan arahan Presiden Jokowi dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan judicial review UU KPK. Dalam pertimbangannya MK menyatakan alih status kepegawaian tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.

"Jika tes tersebut dimaknai dengan metode seleksi, bukankah hal itu menimbulkan dampak kerugian bagi pegawai KPK? Lagi pula mesti dipahami bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat serta tidak bisa ditafsirkan lain," tuturnya.

Pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hadir dalam rapat tersebut.

Sementara, 24 pegawai akan mendapat pendidikan wawasan kebangsaan agar bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan masih ada potensi diberhentikan apabila tidak lolos.

"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," kata Alexander, saat memberikan keterangan pers, Selasa (25/5).

Menurut Alexander, penilaian asesor terhadap 51 pegawai tersebut merah dan tidak mungkin dibina. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan lebih detail mengenai tolok ukur penilaian dan alasan kenapa pegawai KPK itu tidak dapat dibina.

"Yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, ini sudah warnanya dia bilang, sudah merah dan ya, tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," kata Alexander.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana memaparkan tiga aspek dalam penilaian asesmen TWK. Ketiga aspek itu yakni aspek pribadi, pengaruh, dan PUNP (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah). "Untuk yang aspek PUPN itu harga mati. Jadi tidak bisa dilakukan penyesuaian, dari aspek tersebut," kata Bima. ● **mar**

Pemerintah Jangan Anggap Sepele Bocornya 279 Juta Data WNI

JAKARTA (IM) - Bocornya 279 juta data WNI membuat sejumlah pihak geram. Apalagi diduga data itu diperjualbelikan di sejumlah forum dan situs online. Anggota DPR menganggap hal in persoalan seius. Anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi menilai, ocornya 279 juta data WNI ini bisa berdampak pada keamanan nasional. Dan jika dugaan itu terbukti benar, maka tidak ada lagi jaminan perlindungan data bagi WNI.

"Kasus dugaan kebocoran data 279 juta warga negara Indonesia yang diduga dari data peserta BPJS Kesehatan, sangat membahayakan keamanan nasional. Jika benar hasil investigasi bahwa data bocor, maka tidak ada jaminan maupun perlindungan data yang bersifat pribadi (privat). Apalagi jika benar dugaan jual beli data pribadi, maka ini sebuah tindakan kriminal," kata Bendahara DPP PAN ini kepada wartawan, Rabu (26/5).

Kebocoran data ini diduga berasal dari data BPJS Kesehatan sebagaimana pernyataan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Untuk itu, Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) ini mendesak agar pemerintah tidak menganggap dugaan bocornya data ini sebagai masalah sepele. Sebab, data tersebut bisa disalahgunakan untuk berbagai kejahatan yang bisa berbahaya bagi bangsa Indonesia.

"Pemerintah jangan menganggap persoalan ini sebagai masalah sepele. Sebab, pelaku kejahatan memanfaatkan data tersebut untuk melakukan serangan rekayasa sosial atau upaya peretasan adalah ancaman besar bagi bangsa. Data peserta BPJS Kesehatan sangat lengkap, calon peserta harus mengisi data yang sudah link dalam sistem dukcapil di kelurahan, di portal edabu system BPJS Kesehatan, dan menginput data diri lengkap sesuai KTP, NIK ditambah nomor HP, dan e-mail, dan nominal gaji," tegas Intan. ● **han**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PT ARTHAVEST Tbk
DAN ENTITAS ANAK

Sahid Sudirman Center Lt.55
Jalan Jend.Sudirman No.86, Jakarta 10220
Telp : +62-21-3111 6101

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	77.841.604.715	64.844.741.788
Investasi jangka pendek	10.268.820.000	6.521.470.000
Piutang usaha - neto		
Pihak ketiga	2.727.858.515	8.191.977.115
Piutang lain-lain	508.411.730	1.076.100.634
Persediaan	660.434.325	988.344.636
Pajak dibayar di muka	223.434.233	392.211.776
Biaya dibayar di muka	1.024.989.685	2.759.628.533
Uang muka	476.503.960	413.855.520
Jumlah Aset Lancar	**93.732.057.163**	**85.188.330.002**
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi saham	25.000.000.000	25.000.000.000
Investasi lain-lain	-	27.802.000.000
Piutang pihak berelasi	24.000.000.000	39.000.000.000
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 162.255.844.367 pada tahun 2020 dan Rp.146.652.249.059 pada tahun 2019	241.844.455.384	259.633.756.608
Aset hak-guna - neto	470.697.322	-
Uang muka pembelian aset tetap	6.234.388.402	1.882.686.012
Taksiran klaim pajak penghasilan	2.469.932.528	-
Aset tidak lancar lain-lain	528.809.398	563.605.934
Jumlah Aset Tidak Lancar	**300.548.283.034**	**353.882.048.554**
JUMLAH ASET	**394.280.340.197**	**439.070.378.556**

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Utang usaha	2.248.081.855	779.259.248
Utang lain-lain	533.182.627	956.165.137
Utang pajak	1.138.937.644	1.516.320.171
Pendapatan diterima di muka	4.747.352.754	6.793.810.534
Beban masih harus dibayar	1.167.279.550	1.897.981.624
Penyisihan untuk penggantian perabot dan perlengkapan hotel serta kesejahteraan karyawan	239.780.544	100.811.884
Liabilitas sewa yang direalisasi dalam satu tahun	229.966.188	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**10.304.581.162**	**12.044.348.598**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	38.966.452.031	37.229.131.477
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	2.077.380.645	17.034.781.198
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang direalisasi dalam satu tahun	240.731.135	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**41.284.563.811**	**54.263.912.675**
JUMLAH LIABILITAS	**51.589.144.973**	**66.308.261.273**
EKUITAS		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham - nilai nominal Rp 200 per saham		
Modal dasar - 850.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 446.674.175 saham	89.334.835.000	89.334.835.000
Tambahan modal disetor - bersih	1.116.892.763	1.116.892.763
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak	1.020.000.000	1.234.969.207
Komponen ekuitas lain		
Penurunan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual	(3.508.480.000)	(1.256.430.000)
Saldo laba		
Belum ditentukan penggunaannya	97.451.463.139	106.645.893.405
Telah ditentukan penggunaannya untuk dana cadangan umum	750.000.000	700.000.000
Sub-jumlah	186.164.710.902	197.776.160.375
Kepentingan Non-Pengendali	156.526.484.322	174.985.956.908
JUMLAH EKUITAS	**342.691.195.224**	**372.762.117.283**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**394.280.340.197**	**439.070.378.556**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
PENDAPATAN USAHA		
Kamar	18.425.066.925	40.746.260.517
Makanan dan minuman	13.689.720.654	36.977.249.106
Fitness dan spa	593.569.380	1.865.925.412
Binatu	121.755.605	480.654.694
Electronic voucher	37.500.000	190.895.200
Document based	-	2.630.893.188
Electronic know your customer	-	2.140.854.400
Short message service -one time password	-	496.675.700
Telepon dan faksimile	-	1.815.903
Lain-lain	66.563.466	195.577.953
Jumlah Pendapatan Usaha	**32.934.176.030**	**85.726.802.073**
BEBAN DEPARTEMENTALISASI		
Beban langsung		
Makanan dan minuman	(3.140.632.174)	(8.515.937.088)
Binatu	(909.792)	(8.886.382)
Electronic - know your customer	-	(1.532.107.600)
Telepon dan faksimile	-	(357.957)
Short message service - one time password	-	(464.903.937)
Lain-lain	(955.350)	(19.860.518)
Sub-jumlah beban langsung	(3.142.497.316)	(10.542.053.482)
Gaji dan tunjangan	(7.838.962.756)	(12.769.148.840)
Beban departementalisasi lainnya	(1.489.708.744)	(3.489.631.792)
Jumlah Beban Departementalisasi	**(12.471.168.816)**	**(26.800.834.114)**
LABA BRUTO DEPARTEMENTALISASI	**20.463.007.214**	**58.925.967.959**
Beban penjualan dan pemasaran	(155.316.084)	(725.227.933)
Beban umum dan administrasi	(41.201.710.759)	(62.053.056.208)
Pendapatan imbalan kerja karyawan	9.697.492.389	-
Pendapatan (beban) operasi lainnya - bersih	(210.515.640)	3.424.093.265
RUGI USAHA	**(11.407.042.880)**	**(428.222.917)**
Pendapatan bunga - bersih	3.919.344.262	4.388.598.779
Beban keuangan	(28.793.392)	(665.184.221)
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	**(7.516.492.010)**	**3.295.191.641**
Pajak final	(187.500)	(41.879.864)
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(7.516.679.510)**	**3.253.311.777**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Pajak kini	(485.758.900)	(3.407.288.500)
Pajak tangguhan	(3.206.830.407)	782.739.605
Beban Pajak Penghasilan	(3.692.589.307)	(2.624.548.895)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**(11.209.268.817)**	**628.762.882**
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	(6.679.590.243)	2.337.738.753
Pajak penghasilan terkait	1.469.509.853	(584.434.688)
Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
Kenaikan (Penurunan) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual	(2.252.050.000)	219.525.000
Laba (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak	**(7.462.130.390)**	**1.972.829.065**
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(18.671.399.207)**	**2.601.591.947**
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	(4.955.977.085)	2.479.808.674
Kepentingan Non-Pengendali	(6.253.291.732)	(1.851.045.792)
JUMLAH	**(11.209.268.817)**	**628.762.882**
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	(9.865.168.084)	3.593.518.747
Kepentingan Non-Pengendali	(8.806.231.123)	(991.926.800)
JUMLAH	**(18.671.399.207)**	**2.601.591.947**
LABA (RUGI) PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	**(11)**	**6**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	31.328.621.711	85.800.285.812
Pembayaran kas kepada pemasok	(21.478.990.087)	(39.593.229.295)
Pembayaran kas kepada karyawan	(24.124.689.840)	(31.786.251.794)
Penerimaan dari pendapatan bunga	3.919.344.262	4.388.598.779
Pembayaran pajak penghasilan	(2.601.086.409)	(3.621.808.516)
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(28.793.392)	(665.184.221)
Penerimaan dari penghasilan lainnya	426.675.743	4.536.871.382
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**(12.558.918.012)**	**19.059.282.147**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Investasi lain-lain	27.802.000.000	-
Penerimaan atas pelepasan Entitas Anak	16.500.000.000	-
Penurunan (kenaikan) investasi jangka pendek	(5.999.400.000)	6.435.000.000
Pelepasan saham Entitas Anak	(5.363.373.778)	-
Uang muka pembelian aset tetap	(4.396.415.300)	(1.882.686.012)
Perolehan aset tetap	(2.261.740.536)	(9.203.188.839)
Perolehan aset hak-guna	(252.000.000)	-
Hasil penjualan aset tetap	73.000.000	46.000.000
Aset keuangan lancar lainnya	-	3.000.000.000
Penambahan aset tidak lancar lain-lain	-	(23.358.334)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	**26.102.070.386**	**(1.628.233.185)**
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**13.543.152.374**	**17.431.048.962**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN DARI PELEPASAN ENTITAS ANAK	**(370.601.730)**	**-**
DAMPAK BERSIH PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS	**(175.687.717)**	**1.221.880**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**64.844.741.788**	**47.412.470.946**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**77.841.604.715**	**64.844.741.788**

Catatan :

- Informasi keuangan konsolidasian PT Arthavest Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra *(member of Rödl International GmbH)* yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, pada tanggal 17 Mei 2021.

Jakarta, 27 Mei 2021
S. E & O.
Direksi
PT ARTHAVEST Tbk